

Judul : Heboh peternakan babi, sesuaikan investasi dengan nilai lokal
Tanggal : Jumat, 08 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Heboh Peternakan Babi Sesuaikan Investasi Dengan Nilai Lokal

ANGGOTA Komisi IV DPR Hindun Anisah menyoroti heboh rencana investasi peternakan babi senilai Rp 10 triliun yang akan dibangun di Jepara, Jawa Tengah. Peternakan berskala industri tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, kesehatan, serta nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

Hindun menegaskan, rencana pendirian peternakan babi tersebut sangat tidak layak dilanjutkan, mengingat mayoritas masyarakat Jepara adalah Muslim.

"Fraksi PKB dengan tegas menolak pendirian peternakan babi di Jepara. Proyek ini mengandung risiko besar bagi lingkungan dan melukai nilai sosial masyarakat," ujar anggota Fraksi PKB DPR itu, Kamis (7/8/2025).

Menurut Hindun, proyek tersebut belum dilengkapi dengan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang komprehensif. Padahal, limbah cair dan padat dari peternakan babi sangat berisiko mencemari udara, tanah, dan sumber air bersih jika tidak dikelola dengan baik. Bau menyengat dari kotoran babi dan risiko pencemaran menjadi ancaman nyata bagi kenyamanan dan kesehatan warga.

Dia bilang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah telah menyatakan bahwa membuka, mengizinkan, atau mendukung usaha peternakan babi adalah haram.

"Fatwa tersebut merupakan cerminan aspirasi umat Islam

Jepara. Pemerintah tidak boleh mengabaikan suara masyarakat dan memaksakan kebijakan yang bertentangan dengan nilai lokal," ujar Hindun.

Fraksi PKB, lanjutnya, akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan mendesak agar proyek tersebut dibatalkan. Pemerintah juga diminta membuka ruang dialog terbuka dan tidak menutup mata terhadap potensi keresahan sosial yang muncul. Hal ini demi menjaga ketenteraman sosial dan kelestarian lingkungan.

"Kami mendesak Pemerintah menentang rencana pendirian peternakan babi di Jepara," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid juga menyuarakan penolakan. Politisi Gerindra asal Jepara itu mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat selama masa reses, terutama terkait keresahan atas proyek tersebut.

"Rencana ini berpotensi memicu keresahan dan konflik sosial, mengingat mayoritas warga menolak keras keberadaan peternakan babi di daerahnya," ucapnya.

Dia menyarankan Pemerintah Kabupaten Jepara mencari alternatif sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak menimbulkan polemik dan penolakan sosial.

Wachid juga mendukung fatwa haram MUI Jateng yang dinilai sudah tepat dan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat Jepara yang mayoritas Muslim.

"Fatwa MUI sangat bijak dan saya mendukung sepenuhnya," ujarnya. ■ TIF